



# **TAX SERIES:**

## **DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERSIAPKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI**



**HIMAJAK FIA UB**

**TAX SERIES:**  
**DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL  
DALAM MEMPERSIAPKAN PEREKONOMIAN  
INDONESIA PASCA PANDEMI**

**HIMAPAJAK FIA UB**



**TAX SERIES: DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERSIAPKAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA PASCAPANDEMI**

Tim Penulis:

**Nanda Ayu Rosyidah... [et al.]**

Desain Cover:

**Ridwan**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**N. Rismawati**

ISBN:

**978-623-5811-07-9**

Cetakan Pertama:

**November, 2021**

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2021**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

# PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “*Tax Series: Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi*” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang *Tax Series: Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi*.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2021

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1 STRATEGI KOLABORASI HEXA-HELIX SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	2
B. Landasan Teori.....	7
C. Metodologi Penelitian .....	9
D. Hasil dan Pembahasan.....	10
E. Kesimpulan .....	15
<b>BAB 2 KAJIAN LITERASI: KEBIJAKAN <i>ALTERNATIVE</i> MINIMUM TAX SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN BADAN DI INDONESIA</b> .....	<b>19</b>
A. Pendahuluan.....	20
B. Landasan Teori.....	24
C. Metodologi Penelitian .....	27
D. Hasil dan Pembahasan.....	27
E. Kesimpulan .....	33
<b>BAB 3 URGENSI PEMAJAKAN ATAS KRIPTO UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI DI INDONESIA</b> .....	<b>39</b>
A. Pendahuluan.....	40
B. Landasan Teori.....	41
C. Metodologi Penelitian .....	42
D. Hasil dan Pembahasan.....	43
E. Kesimpulan .....	51
<b>BAB 4 PERLUKAH <i>TAX AMNESTY</i> JILID II?</b> .....	<b>57</b>
A. Pendahuluan.....	58
B. Landasan Teori.....	61
C. Metodologi Penelitian .....	62
D. Hasil dan Pembahasan.....	63
E. Kesimpulan dan Saran .....	69

<b>BAB 5 ADAPTASI TEKNOLOGI KRIPTO DI MASA DEPAN MENJADI KATALISATOR PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA .....</b>	<b>73</b>
A. Pendahuluan.....	74
B. Landasan Teori.....	76
C. Metodologi Penelitian .....	79
D. Hasil dan Pembahasan.....	80
E. Kesimpulan .....	86
<b>BAB 6 KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF DALAM MENGATASI <i>SAVING GLUT OF THE RICH</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>91</b>
A. Pendahuluan.....	92
B. Landasan Teori.....	95
C. Metodologi Penelitian .....	98
D. Hasil dan Pembahasan.....	99
E. Kesimpulan .....	105
<b>BAB 7 OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK <i>HIGH NET WORTH INDIVIDUALS</i> MELALUI PENDEKATAN <i>DIFERENSIAL COMPLIANCE RISK MANAGEMENT</i> .....</b>	<b>109</b>
A. Pendahuluan.....	110
B. Landasan Teori.....	112
C. Metode Penelitian .....	113
D. Hasil dan Pembahasan.....	114
E. Kesimpulan .....	121
<b>BAB 8 <i>CARBON TAX</i> SEBAGAI INSTRUMEN KRUSIAL DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI INDONESIA PASCAPANDEMI COVID-19.....</b>	<b>127</b>
A. Pendahuluan.....	128
B. Landasan Teori .....	131
C. Metodologi Penelitian .....	132
D. Hasil dan Pembahasan.....	133
E. Kesimpulan .....	140

<b>BAB 9 INSENTIF PPH PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DITENGAH COVID 19 .....</b>	<b>145</b>
A. Pendahuluan.....	146
B. Landasan Teori.....	147
C. Metodologi Penelitian .....	149
D. Hasil dan Pembahasan.....	149
E. Kesimpulan .....	152
<b>BAB 10 PPH 21 DTP: DILEMA STIMULUS FISKAL DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEMBERI KERJA ATAU DAYA BELI PEKERJA.....</b>	<b>155</b>
A. Pendahuluan.....	156
B. Landasan Teori.....	158
C. Metodologi Penelitian .....	160
D. Hasil dan Pembahasan.....	161
E. Kesimpulan .....	169
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>173</b>



# STRATEGI KOLABORASI HEXA-HELIX SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI

---

**Nanda Ayu Rosyidah**  
**Chatarina Oktaviani Cahyaningtyas**  
**lik Wahyu Putra**

**Abstrak:** Adanya pandemi COVID-19 tidak hanya memberi dampak pada kesehatan saja tetapi juga kondisi ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah menekan angka persebaran COVID-19 dengan berbagai kebijakan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun upaya penekanan angka persebaran COVID-19 tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian dan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan solusi dari permasalahan terganggunya perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yaitu strategi kolaborasi hexa-helix sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari artikel



## DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, O., Monteiro., M.Thomson. 2012. A Growth Model for the Quadruple Helix Inovation Theory. *Journal of Business Economics and Management*. Vol.13, Issue 4, : 1-31.
- Akbar, C. 2020. TNI dan Polri di Komite Penanganan Covid-19, Ekonom: Tidak Perlu. <https://bisnis.tempo.co/read/1375540/tni-dan-polri-di-komite-penanganan-covid-19-ekonom-tidak-perlu>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021
- Andreas Syah Pahlevi, S. M. 2017. Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. *Seminar Nasional Seni dan Desain: "Membangun Tradisi Inovasi Melalui Riset Berbasis Praktik Seni dan Desain"*, 185-188.
- Bareksa.com. 2020. Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Minus 5,32 Persen, Nilai PDB Rp3.687 Triliun. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-08-05/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-minus-532-persen-nilai-pdb-rp3687-triliun>.
- BBC News Indonesia. 2020. "Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara - bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021
- Bramasta, D. B. 2021. Kasus Covid-19 Kian Menanjak, Kapan Efek PPKM Darurat Akan Terasa?. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/10/091600465/kasus-covid-19-kian-menanjak-kapan-efek-ppkm-darurat-akan-terasa?page=all>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif . Jakarta : Kencana Prenada Media.Covid.go.id

- Dewi, R. T. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo). *UNS-Pascasarjana Prodi. Administrasi Publik-S240809001-2012*.
- Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- dikti/kabar/gotong-rotong-penta-helix-dalam-pemulihan-ekonomi-yang-terdampak-covid-19/. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.
- H. S., Purba, D. W., & Ramadhani, Y. R. 2020. Pandemi COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 7.
- Haryono, N. 2012. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1. 47-53*.
- INOVASI. *Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017 "Perkembangan Konsep Riset E-Business di Indonesia, 690-705*.
- Leahey, E., 2016. From Sole Investigator to Team Scientist: Trends in the Practice and Study of Research Collaboration. *Annu Rev Sociol.* 42:81–100
- Masrul, M., Tasnim, J. S., Daud Oris Krianto Sulaiman, C. P., Purnomo, A., Febrianty, D.
- Nurita, D. (2021). *KPC-PEN Diusulkan Dibubarkan, KSP: Jokowi Tetap Beri Kepercayaan Penuh*. <https://nasional.tempo.co/read/1484134/kpc-pen-diusulkan-dibubarkan-ksp-jokowi-tetap-beri-kepercayaan-penuh>. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Praswati, A. N. (2017). PERKEMBANGAN MODEL HELIX DALAM PENINGKATAN
- Rachim, Abd., Yopie W., Astuti, Retno S., & Suharyanto. (2020). Hexa Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. *Prizren Social Science Journal* 4. No. 1. 20-27.

- Togar M Simatupang, Y. H. 2009. Analisis Kolaborasi Coca-Cola Dan Carrefour Dengan Menggunakan Teori Drama. *Jurnal Manajemen Teknologi Volume 8 Nomor 3*. 241-265 Yayat Hendayana. Gotong Royong Penta-Helix dalam Pemulihan Ekonomi yang Terdampak COVID-19 (online). <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar->
- Z Zakaria et al. 2019. The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 396*
- Zed, Mestika. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia



# KAJIAN LITERASI: KEBIJAKAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX* SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN BADAN DI INDONESIA

---

Otniel Dika Putra  
Rizqi Amalia Shafira  
Andini We Terri Maharani

**Abstrak:** Potensi wajib pajak badan tidak melaporkan keuntungan pada SPT tahunan PPh Badan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan alasan pandemi yang mempengaruhi penghasilan yang mereka peroleh. Namun, penghindaran pajak mengakibatkan negara kehilangan penerimaannya dalam sektor pajak. Diperlukan alternatif kebijakan untuk menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan badan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penulisan *paper* ini yaitu teori agensi, teori manfaat pajak, teori kemampuan membayar, teori *Canon of Economy* dan *Canon of Simplicity*, teori William Dunn, dan teori *Alternative Minimum Tax*. Metode yang digunakan dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E. Ghozali, I. 2017. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. 6(3) : 1-12
- Admin. 2020. Apa yang dimaksud dengan pandemi?. <https://covid19.go.id/>. 3 Agustus 2021.
- Admin. 2020. Implementasi Rugi Fiskal Melalui Alternative Minimum Tax. <http://satvika.co.id/>. 7 Agustus 2021.
- Admin. 2020. Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/>. 15 Agustus 2021.
- Admin. 2020. RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. <https://money.kompas.com/>. 10 Agustus 2021.
- Admin. 2021. Banyak perusahaan tak cetak laba, penerimaan pajak korporasi 2020 turun drastis. <https://www.ssas.co.id/>. 7 Agustus 2021.
- Admin. 2021. Ibu Sri Mulyani Jangan Lengah, Awas Praktik Penghindaran Pajak Korporasi!. <https://www.ssas.co.id/>. 6 Agustus 2021.
- Admin. 2021. SPT PPh badan berpotensi banyak yang tidak melaporkan laba, ini kata pengamat pajak. <https://www.ssas.co.id/>. 6 Agustus 2021.
- Admin. 2021. Waspadai Obesitas *Potential Loss!*. <https://artharayaconsult.com/>. 15 Agustus 2021.
- Admin.2020.ManfaatMembayarPajakbagiPengusaha. <https://konsultanpajaksurabaya.com/>. 26 Agustus 2021
- Alvenina Y, Q. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2019. *Jurnal Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*. 2(2): 87-106.
- Amarani, N. G. C. 2021. Apa itu *Ability to Pay?*. <https://news.ddtc.co.id/>. 25 Agustus 2021
- Atpetsi. 2018. Apa itu Alternative Minimum Tax?. <https://atpetsi.or.id/>. 7 Agustus 2021.
- Amarani, N. G. C. 2021. Apa itu Global Minim Tax?. <https://news.ddtc.co.id/>. 15 Agustus 2021.

- Anggraeni, R. 2021. Sri Mulyani Ungkap Banyak Perusahaan Perusahaan Gunakan Skema Penghindaran Pajak. <https://www.inews.id/>. 10 Agustus 2021.
- Bank Indonesia. 2020. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*. (Edisi IV). Jakarta: <https://www.bi.go.id/>
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faizah, S. N., Adhivinna, V.V. 2017. Pengaruh *Return on Assets, Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*. 5(2): 136-145.
- Fathoni, M. I. 2018. Alternative Minimum Tax: Strategi Pencegahan Penghindaran Pajak PMA. <https://news.ddtc.co.id/>. 15 Agustus 2021.
- Gunadi. 2014. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hardika. N. S. 2007. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 3(2) : 103-112
- Kementerian Keuangan. (2021). APBN KITA KINERJA DAN FAKTA 2020. (Edisi Januari 2021). Jakarta: <https://www.kemenkeu.go.id/>. 15 Agustus 2021.
- Kementerian Keuangan. (2021). Reformasi Perpajakan Untuk Tata Perpajakan yang Adil, Sehat, dan Efektif. <https://www.kemenkeu.go.id/>. 15 Agustus 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia. (Edisi Vol. 4, No. 4 Februari 2021). Jakarta: <https://bappenas.go.id/>
- Kristiaji, B. B. 2018. Apa itu Alternatif Minimum Tax?. <https://news.ddtc.co.id/>. 15 Agustus 2021.
- Kumalasari, Kartika Putri. 2021. Pajak Penghasilan Minimum (Penerapan Alternatif minimum Tax di Indonesia), Jakarta: DDTC.
- Kurniati, D. 2021. Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Data Lengkapnya. <https://news.ddtc.co.id/>. 5 Agustus 2021.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nainggolan, E. U. P. 2020. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> . 6 Agustus 2021.

- Nana, Wulandari, S. 2021. Studi Literatur Penggunaan PBL Berbasis Video untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah. *Jurnal Pendidikan Fisika*. 9(1).
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 7 Agustus 2021.
- Randyatini, V, Shieto. 2021. Analisa *Return on Assets*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*. 1(2): 133-147.
- Rochmat, S. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: PT Eresco.
- Safira, A., Suhartini, D. 2021. The Influence of Financial Factors on Tax Avoidance during the Covid-19 Pandemic on Transportation Companies in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 5(2): 171-182.
- Santoso, Y. I. 2020. Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp68,7 triliun. <https://nasional.kontan.co.id/>. 7 Agustus 2021.
- Sapardi, T. 2013. Estimasi *Potential Loss* Penerimaan Pajak dari Kegiatan *Underground Economy* dengan Pendekatan Moneter. *Media Ekonomi*. 21(1): 71-86.
- Sari, G. M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*. 2(2): 491-512.
- Setiawan, J, Anggito, A. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Vissaro, D. 2021. Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax di Berbagai Negara. <https://news.ddtc.co.id/>. 10 Agustus 2021.
- Vissaro, D. 2021. Menimbang Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia. <https://news.ddtc.co.id/>. 10 Agustus 2021.



# URGENSI PEMAJAKAN ATAS KRIPTO UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI DI INDONESIA

---

**Rama Semida Nehemia Makatita**  
**Divayani Yemima Ersinalsal**  
**Talitha Surya Zabrina**

**Abstrak:** Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan perkembangan dunia virtual yang mempengaruhi kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah perkembangan investasi aset kripto (*cryptocurrency*) di beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. Perkembangan investasi kripto memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan jumlah investor kripto di Indonesia serta jumlah nilai investasi kripto yang dihasilkan setiap tahunnya. Hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menambah pemasukan negara melalui pemajakan atas transaksi aset kripto. Namun, saat ini masih belum ada peraturan pajak yang mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi penjualan aset



# DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku:

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 2020. *Aset Kripto*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Houben, Robby & Alexander Snyers. 2018. *Cryptocurrencies and Blockchains: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*. EuropeanParliament. Brussels.
- Luenberger, David G. 1998. *Investment Science*. Oxford University Press. New York.
- OECD. 2020. *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*. OECD. Paris.
- Rutterford, Janette & Marcus Davidson. 2007. *An Introduction to Stock Exchange Investment, Third Edition*. Palgrave Macmillan. New York.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, cetakan ke-22*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## Sumber Bahan Tayang:

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2021* [Dokumen PowerPoint]. Diakses dari [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210805115129.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210805115129.pdf).
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Perdagangan Aset Kripto di Indonesia* [Dokumen PowerPoint]. Diakses dari [http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel\\_2021\\_02\\_18\\_lne7p27\\_t\\_id.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27_t_id.pdf).

### **Sumber Artikel Ilmiah:**

- Lisa, Ridvia, Maschandra & Rusman Iskandar. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman. *Makalah*.
- Maulani, Atiqoh. 2021. Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurist-Diction*. Vol. 4 (4). Hal. 1333-1356.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasidan Media*. Vol. 16 (1). Hal
- Sundari, Rika & Lintang Venusita. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tanggung Jawab Moral Pengguna *Cryptocurrency* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 1 (1). Hal. 1-15.
- Tanidi, Alvin. 2019. Dampak Uang Kripto terhadap Siklus Sistem Informasi Akuntansi di Masa Mendatang. *Makalah*.

### **Sumber Prosiding Seminar:**

- Saputra, Endra. 2018. Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia. Seminar Nasional Royal (SENAR). 3 September 2018, Asahan, Indonesia. Hal. 491-496.

### **Sumber Artikel Internet:**

- Ashar, Syamsul. 2021. BI Tegaskan Minimal 10 Tahun ke Depan *Cryptocurrency* Tidak Boleh Jadi Alat Pembayaran. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.
- Bestari, Novina & Syahrizal Sidik. 2021. Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta, Salip Saham-Reksa Dana. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.

- Catriana, Elsa. 2021. Animo Masyarakat terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen hingga Akhir Mei 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/06/18/053918126/animo-masyarakat-terhadap-aset-kripto-naik-50-persen-hingga-akhir-mei-2021>. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- CNBC Indonesia. 2021. Aset Kripto Bukan Lawan dari Instrumen Investasi Lain. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210721114158-37-262413/aset-kripto-bukan-lawan-dari-instrumen-investasi-lain>. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. 2021. Meneropong Masa Depan Uang Kripto. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210626192130-92-659802/meneropong-masa-depan-uang-kripto>. Diakses tanggal 9 Agustus 2021.
- Dirgantara, Hikma. 2021. Minat Terhadap Aset Kripto Makin Tinggi, Bursa Kripto Catat Kenaikan Volume Transaksi. <https://investasi.kontan.co.id/news/minat-terhadap-aset-kripto-makin-tinggi-bursa-kripto-catat-kenaikan-volume-transaksi>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Firman, Zul. 2020. Memahami Objek Pajak Penghasilan (PPH) Dalam Menunjang Terselenggaranya Kewajiban Pajak dengan Baik. <https://flazztax.com/2020/08/13/memahami-objek-pajak-penghasilan-pph-dalam-menunjang-terselenggaranya-kewajiban-pajak-dengan-baik/>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Himpunan Mahasiswa Perpajakan FEB UNPAD. 2021. <https://himappa.medium.com/menggagas-cryptocurrency-sebagai-objek-pajak-baru-di-indonesia-ceaf01c24b25>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Mahardika, Lorenzo. 2021. Bappebti dan Kemenkeu Matangkan Pungutan Pajak Investasi Kripto. <https://market.bisnis.com/read/20210617/94/1406891/bappebti-dan-kemenkeu-matangkan-pungutan-pajak-investasi-kripto>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.

- Okezone. 2021. Demam Investasi Kripto, Watimpres Bahas Implementasi di Indonesia. <https://economy.okezone.com/read/2021/06/23/320/2429463/demam-investasi-kripto-watimpres-bahas-implementasi-di-indonesia>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Santoso, Yusuf. 2021. Pemerintah Wacanakan Pajak Transaksi Aset Kripto, Bagaimana Skemanya?. <https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-wacanakan-pajak-transaksi-aset-kripto-bagaimana-skemanya>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Setiawan, Sakina. 2021. Di Tengah Pandemi, Investasi Mata Uang Kripto Menguntungkan?. <https://money.kompas.com/read/2020/07/14/181337026/di-tengah-pandemi-investasi-mata-uang-kripto-menguntungkan?page=all>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Triple A. 2021. *Cryptocurrency Across The World*. <https://triple-a.io/crypto-ownership/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2021.
- Victoria, Agatha. 2021. Dirjen Pajak Kaji Rencana Pungut Pajak Uang Kripto. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60c9e8ae90d3e/dirjen-pajak-kaji-rencana-pungut-pajak-uang-kripto>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Wicaksono, Adityo. 2021. *Cryptocurrency* Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>. Diakses tanggal 6 Agustus 2021.
- Zipmex. 2021. Sejarah *Cryptocurrency*: Lika-liku Aset Kripto. <https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.



## PERLUKAH *TAX AMNESTY* JILID II?

---

**Yesica Palmawira br. Tumorang**  
**Fransiska Aprilla Simamora**  
**Safila Islami**

**Abstrak:** Merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh dunia khususnya Indonesia memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat global, tak terkecuali aktivitas ekonomi. Pandemi ini telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan yang mendorong pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memulihkan sektor perekonomian Indonesia selama masa pandemi dan mempersiapkan ekonomi nasional pascapandemi. Pengoptimalan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator pendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pengoptimalan penerimaan pajak tersebut, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Berangkat dari *tax amnesty* jilid I yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, penulis menyusun karya ilmiah ini untuk membahas urgensi *tax amnesty* jilid II sebagai salah satu langkah yang akan ditempuh dalam upaya

# DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. 2020. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*. Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi COVID-19. 7 (1): 98-110.
- Bank Indonesia. 2019. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2021. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2021*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 2021. COVID-19 Dashboard. <https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. 14 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. 2017. *Setelah Tax Amnesty, Apa Lagi?* [https://www.youtube.com/watch?v=9W\\_1Dso3bxg](https://www.youtube.com/watch?v=9W_1Dso3bxg). 20 Agustus 2021.
- Damayanti, D. 2021. *Big Data dan Rasio Pajak Kita*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/big-data-dan-rasio-pajak-kita>. 19 Agustus 2021.
- Harvelian, A. 2017. *Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Kajian. Far Eastern Federal University.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Modul Level Dasar (CAFB) Hukum Bisnis dan Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamil, N. 2017. *Journal of Multidisciplinary Studies*. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. 1 (1): 51-65.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Pokok-Pokok APBN 2020 Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2020. *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Okfitasari, A., Meikhati, E., Setyaningsih, T. 2017. Akuntansi Multiparadigma JAMAL. *Ada Apa Setelah Tax Amnesty?*.8 (3): 427-611.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964, tentang *Peraturan Pengampunan Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016, tentang *Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*.
- Siregar, L. 2017. Manajemen Pendidikan dan Keislaman. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional dari Sektor Fiskal*. 6 (1): 97-105.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tentang *Pengampunan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.



# ADAPTASI TEKNOLOGI KRIPTO DI MASA DEPAN MENJADI KATALISATOR PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

---

**Felice Sukintjo**  
**Maria Magdalena**  
**Gloria Fangie**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi teknologi kripto terhadap aspek perpajakan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menghasilkan adanya konsep baru dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan didukung oleh undang-undang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang sifatnya mengikat dan mendasar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan analisis silogisme. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga berusaha menemukan suatu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*) karena belum tersedianya kebijakan perpajakan di Indonesia yang mengatur regulasi pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## Buku

- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, & Amin Dara. 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Maulani, Atiqoh Farhah. 2021. Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurist-Diction*, Vol. 4 (4), 2021.
- Sukardji, U. 2014. Pajak Pertambahan Nilai. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi Kelima. Indeks. Jakarta.

## Artikel Jurnal

- Amboro, Y.P., & Christi, A. 2019. Prospek pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 14-40.

## Website

- Bps.go.id. 2021. *Badan Pusat Statistik*. [online] Available at: <<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>> [Accessed 20 Agustus 2021].
- Cermati.com. 2021. *Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*. [online] Available at: <[https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Fungsi%20Anggaran%20\(Fungsi%20Budgeter\),nasiona%20atau%20pengeluaran%20negara%20lainnya.](https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Fungsi%20Anggaran%20(Fungsi%20Budgeter),nasiona%20atau%20pengeluaran%20negara%20lainnya.)> [Accessed 20 August 2021].
- CNBC Indonesia. 2021. *Wow! Segini Gambaran Besarnya Transaksi Bitcoin Cs di RI*. <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423133504-37-240297/wow-segini-gambaran-besarnya-transaksi-bitcoin-cs-di-ri>>, diakses 21 Agustus 2021.
- Coin Aset. 2018. *Pengertian Cryptocurrency Menurut Ahli*, <<https://coinaset.com/pengertian-cryptocurrency-menurut-para-ahli/>>, diakses 31 Agustus 2021.
- Cryptocurrency.id. 2021. *Beli dan Jual bitcoin di harga terbaik*. <<https://cryptocurrency.id/harga>>, diakses 20 Agustus 2021.
- Frankenfield, J., 2021. *Cryptocurrency*. <<https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>>, diakses 20 Agustus 2021
- Kemenkeu.go.id. 2021. *Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. <<https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>>, diakses 20 Agustus 2021.
- Kemenkeu.go.id. 2021. *RAPBN 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. [online] Available at: <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-rapbn-2022-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural/>>, diakses 20 Agustus 2021.

OnlinePajak. 2021. *Syarat Pemungutan Pajak: Ini Pengertian, Dasar Hukum dan Penjelasan*.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjelasan>>, diakses 20 Agustus 2021

Tokopedia. 2021. *Cryptocurrency - Pengertian, Jenis dan Contohnya* | Kamus Tokopedia.

<https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>>, diakses 20 Agustus 2021.



# KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF DALAM MENGATASI *SAVING GLUT OF THE RICH* DI INDONESIA

---

**Firdha Athifah Uszardi**  
**Akbar Ilham Adi**  
**Wine Diwani**

**Abstrak:** Kelebihan tabungan yang dimiliki oleh orang dengan pendapatan tinggi dapat mengarah pada ketimpangan dan melambatnya ekonomi, kelebihan ini disebut dengan *saving glut of the rich*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perpajakan yang tepat dalam upaya memulihkan perekonomian pada masa pandemi COVID-19 dan menurunkan tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat serta mengetahui *saving glut of the rich* yang ada di Indonesia beserta dampaknya pada ketimpangan. Data yang digunakan berasal dari LPS, *Credit Suisse* dan *World Bank* dengan metode analisis kuantitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah jumlah nominal tabungan tahunan penduduk di atas Rp5 Milyar mendominasi nominal tabungan tahunan di Indonesia dengan jumlah penabung yang berjumlah 111.530 penduduk, hanya setara dengan 0,0004% penduduk

# DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara.
- Credit Suisse. 2021. Global Wealth Databook 2021. Credit Suisse Research Institute. DPR RI. 2021. Komisi XI DPR RI Raker Menkeu Dan Menkumham. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=cz9fArbc9RM>.
- Forbes. 2019. "The World's Real-Time Billionaires, Today's Winners and Losers,". 7 Agustus 2021.
- Forbes. 2020. Forbes Publishes 34th Annual List Of Global Billionaires". 7 Agustus 2021.
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2020. Distribusi Simpanan Bank Umum (Vol. 10, Ser. 05). Lembaga Penjamin Simpanan.
- Mian, A., Straub, L., & Sufi, A. 2019. The Saving Glut of the Rich and the Rise in Household Debt. <https://doi.org/10.3386/w26941>
- Ostry J. et. al. 2014. Redistribution, Inequality, and Growth. International Monetary Fund.
- Popescu, M. E. et al., 2019. Flat-Rate versus Progressive Taxation? An Impact Evaluation Study for the Case of Romania. Sustainability.
- Ramadhani, W. 2008 Kebijakan Penerapan Flat Rate Pada Pajak Penghasilan Badan. LIB UI.
- Sánchez, C. M. 2021. Can Inequality Be Reduced by a Net Wealth Tax and Is This a Good Idea? IBFD.
- Schumpeter, J. 1939. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. Vol 2, New York. McGraw-Hill.
- Solow, Robert. 1956. A Contribution to The Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics (The MIT Press).
- Undang Undang Nomor 36. 2019. Perubahan Keempat Atas Undang Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- United Nations. 2020. Inequality in a rapidly changing world / Department of Economic and Social Affairs. World Social Report.

- Wijayanto, B. 2019. Teori Pertumbuhan Endogenous (Endogenous Growth Theory). SSRN Electronic Journal.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3317961>.
- WorldBank. 2021. Gross savings (% of gdp) - indonesia.  
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?locations=ID>.
- Zed, M. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.



# OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK *HIGH NET WORTH INDIVIDUALS* MELALUI PENDEKATAN DIFERENSIAL *COMPLIANCE RISK MANAGEMENT*

---

Chairunnisa Nadilla  
Syaiful Bahri  
Vallencia

**Abstrak:** Optimalisasi pemajakan kelompok *High Networth Individuals* (HNWI) merupakan strategi potensial untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Persoalan klasik rendahnya kepatuhan pajak orang pribadi salah satunya disumbang oleh perilaku penghindaran pajak kelompok HNWI. Pendekatan diferensial *compliance risk management* (CRM) dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak HNWI, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan itu. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan implementasi CRM berbasis teknologi dengan kombinasi *tax enforcement* berbentuk *naming and shaming* dan

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Musgrave, A dan P. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw HillCompany. New York.

## Artikel Jurnal

- Andreoni, Erard, dan J. Feinstein. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*. 36(2): 818-860.
- Astuti, T dan Gunadi. 2021. Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6: 1044-1061.
- Dwenger, Nadja dan Lukas Treber. 2018. Shaming for Tax Enforcement: Evidence from a New Policy, *Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics, and Social Sciences*, 21-2018:1-57.
- Gemmell, N., & Hasseldine, J. 2014. Taxpayers' Behavioural Responses and Measures of Tax Compliance 'Gaps': A Critique and a New Measure. *Fiscal Studies*, 35(3), 275-296.
- Luttmer, E. F. P. dan M. Singhal. 2014. Tax Morale. *Journal of Economics Perspective*, 28 (4), 149-68.
- McLaughlin & Buchanan. 2017. Revenue Administration : Implementing a High-Wealth Individual Compliance Program. *Technical Notes and Manuals* No. 17/07.
- Morse, Susan C. 2012. Tax Compliance and Norm Formation Under High-Penalty Regimes, *Connecticut Law Review*, 44 (3), 675.
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *WidyaWarta* No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011.



- Setiawati dan Prasetyo, Riris Aishah. 2014. Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (SID) Atau BI Checking (Study Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 32(1): 31-42
- Suwiknyo, E. 2020. Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melempem-tren-buruk-berlanjut>. Diakses pada 10 Agustus 2021.
- Truglia, R. P. dan Troiano. 2015. Shaming the Tax Delinquents. NBER, *Working Paper* 21264.
- Warren, Neil. 2018. Estimating Tax Gap is Everything to an Informed Response to the Digital Era. *eJournal of Tax Research*. 16(3): 536-577.

### **Website**

- Bisnis Tempo. 2021. 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persendari Target.  
<https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target>. 4 Agustus 2021.
- CITA. 2018. Mencari Sandaran Pajak dari Orang-Orang Kaya.  
<https://cita.or.id/mencari-sandaran-pajak-dari-orang-orang-kaya/>. 11 Agustus 2021.
- OECD. 2017. Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. *OECD Publishing, Paris*. [https://doi.org/10.1787/tax\\_admin-2017-en](https://doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en). 11 Agustus 2021
- OECD. 2009. Managing and Improving Compliance: Recent Developments in Compliance Risk Treatments. Forum on Tax Administration: Compliance Sub-Group. March 2009.  
<https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/42490764.pdf>. 16 Agustus 2021

- Primadhyta, Safyra. 2017. Akasia jadi Andalan Fiskus Buka Data Bank Pengemplang Pajak.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170213150141-78-193178/akasia-jadi-andalan-fiskus-buka-data-bank-pengemplang-pajak>. 16 Agustus 2021
- Ramalan, Suparjo. 2021. Pertamina Dihapus, Kartu Kredit Direksi-Komisaris BUMN Lain Masih Diberikan.  
<https://economy.okezone.com/read/2021/06/17/320/2426580/pertamina-dihapus-kartu-kredit-direksi-komisaris-bumn-lain-masih-diberikan>. 16 Agustus 2021
- Sembiring, Lidya Julita. 2021. Super Tajir, 100 Ribu Warga RI Punya Tabungan di Atas Rp 5M!  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210810085833-17-267401/super-tajir-100-ribu-warga-ri-punya-tabungan-di-atas-rp-5-m>. 10 Agustus 2021.
- Subroto, Gathot. 2020. *Memahami Tax Gap*.  
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-memahami-tax-gap-2020-01-09-6bfb976f/>. 11 Agustus 2021.
- Thertina, Martha Ruth. 2018. Data 3-4 Juta Kartu Kredit Orang Kaya Berpotensi Disetor ke Pajak.  
<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5603e0969/data-3-4-juta-kartu-kredit-orang-kaya-berpotensi-disetor-ke-pajak>. 16 Agustus 2021
- Treasury Inspectorat General for Tax Administration. 2020. Billions in Potential Taxes Went Unaddressed From Unfiled Returns and Underreported Income by Taxpayers That Received Form 1099-K
- Vissaro, Denny. 2020. Webinar Hari Pajak - Refleksi dan Outlook Sektor Pajak Indonesia: Peluang dan Tantangan. Youtube DDTC.  
<https://www.youtube.com/watch?v=SEQFFR35FDk&t=2544>. 11 Agustus 2021



# **CARBON TAX SEBAGAI INSTRUMEN KRUSIAL DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI INDONESIA PASCAPANDEMI COVID-19**

---

**Edwin Aqil  
Muhamad Iqbal Nurrasyid  
Muhammad Reza**

**Abstrak:** Dalam beberapa tahun terakhir, emisi karbon telah menghadirkan kesulitan besar bagi pembangunan berkelanjutan masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya insentif fiskal untuk penanganan Covid-19 yang mengarah pada eksternalitas negatif atas karbon di Indonesia. Kurangnya refleksi kebijakan oleh pemerintah Indonesia membuat insentif fiskal tersebut diterima oleh industri tenaga listrik dan gas alam yang merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar. Indonesia juga menurunkan tarif PPh badan, tetapi masih memiliki masalah penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi implementasi *carbon tax* menjadi salah satu kebijakan pajak dalam mengurangi emisi karbon dan sebagai sumber penerimaan negara Indonesia pascapandemi

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. [Online] Available at: [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf) [Accessed 29 Agustus 2021].
- BPK RI, 2016. *Peraturan BPK*. [Online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573> [Accessed 29 Agustus 2021].
- BPS, 2020. *Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen*. [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>. [Accessed 29 Agustus 2021].
- BPS, 2021. *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>. [Accessed 29 Agustus 2021].
- Climate Transparency, 2018. *Brown To Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon*. [Online] Available at: <https://iesr.or.id/pustaka/brown-to-green-transisi-g20-menuju-ekonomi-rendah-karbon> [Accessed 30 Agustus 2021].
- CNBC, 2021. *Terapkan Pajak Karbon, Sri Mulyani Bisa Raup Rp 53 Triliun!*, Jakarta:CNBC Indonesia.
- Cnossen, S., 2005. Theory and practice of excise taxation : smoking, drinking,gambling, polluting, and driving. *Oxford University Press*.
- DDTC, 2020. *Sri Mulyani Ungkap Alasan Penurunan Tarif PPh Badan Masuk Perpu*. [Online] Available at: [https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perpu-19938?page\\_y=500](https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perpu-19938?page_y=500). [Accessed 30 Agustus 2021].

- Dell, M., Jones, B. F. & Olken, B. A., 2014. What Do We Learn from the Weather? The New Climate–Economy Literature. *Journal of Economic Literature*, 52(3), pp. 740-798.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2019. *Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?*. [Online] Available at: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html> [Accessed 31 Agustus 2021].
- Dyarto, R. & Setyawan, D., 2020. Understanding the Political Challenges of Introducing a Carbon Tax. *International Journal of Environmental Science and Technology*, pp. 1-10.
- ESI Africa, 2020. *Carbon tax: Accelerating the transition to a low-carbon economy*. [Online] Available at: <https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/carbon-tax-accelerating-the-transition-to-a-low-carbon-economy/> [Accessed 1 September 2021].
- Ezenagu, A., 2016. Carbon Taxation as a Tool for Sustainable Development in Africa: Evaluation of Potentials, Paradoxes and Prospects. *SSRN Electronic Journal*, pp. 1-13.
- Freire-González, J., 2018. Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review. *Journal of Policy Modeling*, 40(1), pp.194-223.
- Gleckman, H., 2018. *Bill Nordhaus, The Nobel Prize, Climate Change And Carbon Taxes*. [Online] Available at: <https://www.forbes.com/sites/howardgleckman/2018/10/10/bill-nordhaus-the-nobel-prize-climate-change-and-carbon-taxes/?sh=752ab4ea6a03> [Accessed 31 Agustus 2021].
- IEA, 2020. *South African Carbon Tax*. [Online] Available at: <https://www.iea.org/policies/3041-south-african-carbon-tax> [Accessed 1 September 2021].
- IESR, 2020. *Green Stimulus, Key in Indonesian Post-COVID-19 Economic Recovery*. [Online] Available at: <https://iesr.or.id/green-stimulus-key-in-indonesian-post-covid-19-economic-recovery> [Accessed 1 September 2021].
- Journal UIN Jakarta*, pp. 119-128.

- Kemenkeu, 2021. *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. [Online] Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/> [Accessed 3 September 2021].
- Kontan, 2020. *Tiga BUMN ini segera dapat kompensasi penanganan Covid-19 senilai Rp 94,23 triliun*, Jakarta: Nasional Kontan.
- KPMG, 2021. *South Africa: Carbon tax measures included in budget 2021*. [Online] Available at: <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/02/tnf-south-africa-carbon-tax-measures-included-budget-2021.html> [Accessed 1 September 2021].
- Kristiaji, B., 2016. *Urgensi Pigouvian Tax untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://news.ddtc.co.id/urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662>. [Accessed 28 Agustus 2021].
- Mankiw, N. G., 2015. *Principles of Economics*. In: Boston: Cengage Learning.
- National Treasury Republic of South Africa, 2020. *Carbon Offsetting Under The Carbon Tax Act*. [Online] Available at: <http://www.energy.gov.za/files/COAS/2020/Carbon-Offsetting-under-the-Carbon-Tax-Act.pdf> [Accessed 1 September 2021].
- Okonkwo's, J. U., 2020. Welfare effects of carbon taxation on South African households. *Energy Economics*. *Energy Economics*.
- Prabowo, Y., 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Putranti, T. M., 2021. *Wacana Pajak Karbon di Indonesia*. Jakarta: DDTC.
- South African Revenue Service, 2021. *Carbon Tax*. [Online] Available at: <https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/excise/environmental-levy-products/carbon-tax/> [Accessed 1 September 2021].
- Sulastyawati, D., 2014. *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*.

- Wang, L., Xu, T. & Qin, L., 2019. A Study on Supply Chain Emission Reduction Level Based on Carbon Tax and Consumers' Low-Carbon Preferences under Stochastic Demand. *Mathematical Problems in Engineering - Hindawi*, pp. 1-20.
- Wong, K. Y., Chuah, J. H. & Hope, C., 2016. Carbon taxation in Malaysia: insights from the enhanced PAGE09 integrated assessment model. *Carbon Management*, Volume 7, pp. 1-12.
- WRI, 2020. *This Interactive Chart Shows Changes in the World's Top 10 Emitters*. [Online] Available at: <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters> [Accessed 27 Agustus 2021].



# INSENTIF PPH PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DITENGAH COVID 19

---

**Arum Setyoningrum Widodo**  
**Ainul Fitriyah Kartika Dewi**  
**Zidny Nada Fauziyah**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21, untuk menghitung insentif PPh Pasal 21 dan pencatatannya di perusahaan sebagai pemberi kerja, dan untuk mengetahui hubungan antara insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dengan usaha meningkatkan ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode kajian pustaka. Kesimpulan penelitian ini adalah Kriteria karyawan yang menerima insentif pajak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja golongan menengah kebawah yang terdampak covid 19, hasil perhitungan insentif PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa *take home pay* yang lebih besar, menggerakkan roda perekonomian UMKM, sebagai



## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Bawono, Icuk Rangga, Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 1, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Situasi Covid 19. <https://kemkes.go.id>. Diakses 28 Agustus 2021.
- Nurkamto, Joko. 2020. *Makalah Dalam Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Gombang Buku Budaya. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/ PJ/ 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. PT Bumi Aksara. Jakarta

BAB  
10

## PPH 21 DTP: DILEMA STIMULUS FISKAL DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEMBERI KERJA ATAU DAYA BELI PEKERJA

---

Dzulfan Hidayat  
Zakky Ashidiqi  
Samuel Rex William

**Abstrak:** Dampak negatif yang timbul akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan penawaran dan permintaan sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat. Melalui stimulus fiskal, pemerintah bertekad untuk mengurangi tingkat PHK dan pengurangan jam kerja dengan menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPH 21 DTP) sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Disamping itu, pemerintah melalui insentif PPh 21 DTP juga ingin menjaga daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan subsidi PPh 21 yang diberikan melalui pemberi kerja. Namun, kebijakan insentif PPh 21 DTP ini menimbulkan dilema, sebab dari sisi pemberi kerja mereka masih enggan memanfaatkan fasilitas insentif ini akibat tingginya beban

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Holmes, K., 2001. *The Concept of Income: A Multi Disciplinary*. s.l.:IBFD.
- Rosdiana, H. and Irianto, E. S. (2012) *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi diIndonesia, PT RajaGrafindo Persada*.

## Artikel Jurnal

- Rosdiana, H., 2010. Rekonstruksi Konsepsi Supply-side Tax Policy. *BISNIS & BIROKRASI:Jurnal Ilmu dan Organisasi*, 15(3), pp. 202-205.
- Santo Faskafri (2020) 'Perencanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21', *Pelayanan Kesehatan*, (2015), pp. 3–13. Dapat diakses: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter1.pdf>.

## Website

- Bisnis.com (2021) 'Program Mitigasi Pandemi Diklaim Berdampak Positif bagi Tenaga Kerja'. Dapat diakses: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210315/12/1367790/program-mitigasi-pandemi-diklaim-berdampak-positif-bagi-tenaga-kerja>.
- Dapat diakses: <https://mucglobal.com/id/news/2341/pph-21-ditanggung-pemerintah-kemudahan-dan-kendalanya-bagi-pemberi-ker> [Diakses 2 September 2021].
- DDTC News, 2021. *Risiko Insentif PPh Pasal 21 DTP Tidak Diterima Pegawai*. [Online] Dapat diakses: [https://news.ddtc.co.id/risiko-insentif-pph-pasal-21-dtp-tidak-diterima-pegawai-ini-kata-bpk-30780?page\\_y=994](https://news.ddtc.co.id/risiko-insentif-pph-pasal-21-dtp-tidak-diterima-pegawai-ini-kata-bpk-30780?page_y=994) [Diakses 2 September 2021].
- Dewi, H. K. (2021) Pemerintah akan alihkan insentif PPh pasal 21 jadi BLT, begini komentar CITA. Dapat diakses: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-alihkan-insentif-pph-pasal-21-jadi-blt-begini-komentar-cita> 2021).
- Group, M. C., 2021. *PPH 21 Ditanggung Pemerintah, Kemudahan dan Kendalanya BagiPemberi Kerja*. [Online]

Triatmojo, D. (2021) *Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan*. Dapat diakses: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan> 2021).

## PROFIL PENULIS

### **HIMAPAJAK FIA UB**

Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) merupakan himpunan yang menaungi mahasiswa perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Berdiri sejak Desember 2012 dengan tahun kepengurusan pertama tahun 2013. HIMAPAJAK bergerak dalam bidang akademisi sehingga seluruh kegiatan dan program kerja berlandaskan pada akademik dan keilmuan. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing kualitas mahasiswa perpajakan di Indonesia serta terus berkontribusi untuk peningkatan kualitas mutu Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) adalah himpunan mahasiswa yang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. HIMAPAJAK menjadi wadah bagi mahasiswa perpajakan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Selain itu, organisasi ini diharapkan mampu menjadi lembaga fasilitator yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap perpajakan dan menyampaikan aspirasi mahasiswa program studi perpajakan kepada pihak terkait.



## TAX SERIES:

### DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERSIAPKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI

Lomba “*Call for Paper 2021*” yang diikuti oleh mahasiswa/i di seluruh Indonesia diadakan secara daring. *Call for Paper 2021* bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis, melatih keterampilan untuk melakukan suatu penelitian, melatih kemampuan menulis, dan menuangkan gagasan baru yang bermanfaat bagi perekonomian dan perpajakan Indonesia. *Call for Paper 2021* mengangkat tema “Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi” dengan berbagai subtema seperti perpajakan dan keputusan bisnis, ekonomi perpajakan, perpajakan dan informasi teknologi, hukum perpajakan, akuntansi perpajakan, komunikasi perpajakan, dan psikologi perpajakan. Alasan mengangkat tema tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang perekonomian Indonesia. Dampak paling signifikan pada bidang ekonomi yaitu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan. Berbeda dengan sebelum masa pandemi, Indonesia tidak mengalami defisit yang signifikan.

Hal ini tentu mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan strategi salah satunya melalui kebijakan fiskal sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi mengingat pendapatan terbesar negara berasal dari pajak.